BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tanda kemajuan suatu wilayah yaitu dilihat dari pembangunan infrastruktur. Dalam lingkup tata kelola pemerintahan modern, infrastruktur bukan hanya berarti pembangunan fisik, melainkan juga merupakan bukti nyata tekad pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara rencana pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Infrastruktur sering kali dibangun tanpa memperhatikan sepenuhnya keinginan dan pendapat masyarakat.

Di dalam kerangka pengembangan infrastruktur di wilayah tertentu, pencatatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi sangat signifikan untuk dilakukan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (1995), infrastruktur yang berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan akses publik terhadap layanan dasar. Selain itu, Kodoatie (2005) menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Dia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa memenuhi keinginan dan harapan masyarakat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi kesejahteraan rakyat.

Visi dan misi yang diusung oleh Bupati Hendy terkait pembangunan infrastruktur telah menciptakan ekspektasi, terutama mengingat adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur dan permasalahan infrastruktur yang diwariskan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kecamatan Balung sebagai salah satu wilayah administratif yang tengah mengalami perkembangan pembangunan, memerlukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas infrastruktur yang telah direalisasikan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, alokasi anggaran untuk infrastruktur selama periode 2021-2024 menjadi sorotan penting. Prioritas pembangunan yang ditetapkan, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, perlu dikoordinasi dengan kebutuhan aktual masyarakat Jember. Isu pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Anggaran dana desa diberikan untuk pembangunan desa juga penting untuk diketahui. Anggaran dana desa di Kecamatan Balung bervariasi di tiap desa, mulai dari Desa Balungkidul Rp979.388.000, Desa Balungkulon Rp1.475.298.000, Desa Balunglor Rp1.264.704.000, Desa Curahlele Rp1.131.149.000, Desa Gumelar Rp1.150.015.000, Desa Tutul Rp1.363.751.000, Desa Karang Semanding Rp1.077.754.000, dan Desa Karangduren Rp1.282.103.000

Pengukuran IKM yang terkait dengan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan sangat penting. Ini disebabkan oleh tekad pemerintah daerah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur demi meningkatkan hubungan dan kemudahan akses warga. Beberapa proyek infrastruktur telah dikerjakan di Kecamatan Balung, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Tetapi, perlunya dilakukan survei kepuasan masyarakat untuk menilai sejauh mana program-program itu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Balung. Pengukuran IKM memberikan informasi berharga pada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana nilai tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Jember terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Balung 2024.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Jember terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Balung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini akan menambah wawasan tentang konsep IKM. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang mengupas topik yang sama dan juga memberikan sudut pandang baru dalam memahami interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait konsep Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Bagi pemerintah Kabupaten Jember

Penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat. Temuan studi bisa membantu pemerintah daerah mengenali aspek-aspek infrastruktur yang perlu didahulukan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan kebutuhan dan harapan mereka terkait pembangunan infrastruktur di Kecamatan Balung. Temuan studi bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi dan menilai prestasi pemerintah daerah dalam memenuhi komitmen pembangunan yang dilakukan.

d. Bagi para ahli dan pengamat kebijakan publik

Studi ini dapat memberikan sumbangan untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya pengukuran IKM sebagai sarana untuk memperbaiki mutu pelayanan publik, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.